

RINGKASAN

HUKA SHIRAATH MAULANI :
200510271

Pelaksanaan Kewajiban Ayah Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*) Pasca Putusnya Perkawinan (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta)
(Dr. Ramziati, S.H., M.H dan T.Saifullah, S.H.I., M.S.I)

Orangtua tetap berkewajiban bertanggung jawab memelihara dan mendidik anak-anaknya meskipun hubungan perkawinan telah terputus, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun realitanya masih dijumpai ayah melalaikan kewajibannya dalam memberikan biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*) pasca putusnya perkawinan. Dalam Putusan Perkara Nomor: 122/Pdt.G/2019/PTA.JK. yang menguatkan Putusan Perkara Nomor: 4773/Pdt.G/2018/PA.JT bahwa bekas suami tidak melaksanakan kewajibannya dalam memberikan biaya pemeliharaan dari kedua anak yang diasuh oleh ibunya. Permasalahan dalam kajian ini membahas bagaimana pelaksanaan kewajiban ayah terhadap biaya pemeliharaan anak pasca putusnya perkawinan, faktor hambatan dan upaya bekas istri dalam pelaksanaan kewajiban ayah terhadap biaya pemeliharaan anak pasca putusnya perkawinan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban ayah terhadap biaya pemeliharaan anak, faktor hambatan serta upaya bekas istri dalam pelaksanaan kewajiban ayah terhadap biaya pemeliharaan anak pasca putusnya perkawinan.

Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris dengan jenis pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif dalam memperoleh jawaban penelitian ini. Sumber data menggunakan data primer dari hasil wawancara dengan informan dan responden. Sedangkan data sekunder dari hasil kajian kepustakaan yang relevan dengan objek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bekas suami telah berusaha melaksanakan kewajibannya dalam memberikan biaya pemeliharaan anak tetapi dalam pelaksanaannya masih belum maksimal dilakukan karena kemampuan ekonomi yang tidak mencukupi ditambah komunikasi yang kurang harmonis dengan bekas istri sehingga berdampak kepada kebutuhan dan kepentingan anak. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan penerapan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata untuk memecahkan eksekusi /pelaksanaan dengan menetapkan bahwa “segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik tergugat, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah anak tersebut” kepada penggugat seakan-akan menjadi “tekanan psikis” bagi tergugat sehingga dapat terpenuhinya kebutuhan dan kepentingan anak-anaknya secara rutin.

Disarankan kepada para orangtua pasca putusnya perkawinan tetap menjalin komunikasi dengan baik untuk kepentingan anak-anaknya. Kepada pengadilan agama agar melakukan peningkatan dan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban ayah terhadap biaya pemeliharaan anak pasca putusnya perkawinan.

Kata Kunci: Pelaksanaan Kewajiban Ayah, Pemeliharaan Anak, Putusnya Perkawinan

SUMMARY

HUKA SHIRAATH MAULANI :
200510271

**Implementation of Father's
Obligation Toward the Cost of Child
Maintenance (Hadhanah) After the
Breakup of Marriage (Research Study
in the Legal Area of the Jakarta
Religious High Court)
(Dr. Ramziati, S.H., M.H And
T.Saifullah, S.H.I., M.S.I)**

Parents are still obliged to be responsible for maintaining and educating their children even though the marriage relationship has been broken, as stipulated in Article 41 of Marriage Law No.1 of 1974, but in reality it is still found that fathers neglect their obligations in providing child maintenance costs (*hadhanah*) after the breakup of marriage. In Case Decision Number: 122/Pdt.G/2019/PTA.JK. which strengthens Case Decision Number: 4773/Pdt.G/2018/PA.JT that the former husband did not carry out his obligations in providing the maintenance costs of the two children raised by his mother. The problem in this study discusses how the implementation of the father's obligation to the cost of child maintenance after the breakup of marriage, obstacle factors and efforts of the former wife in the implementation of the father's obligation to the cost of child maintenance after the breakup of marriage.

The purpose of this study is to determine the implementation of the father's obligation to the cost of child maintenance after the breakup of marriage, to find out the obstacle factors and efforts of the former wife in the implementation of the father's obligation to the cost of child maintenance after the breakup of marriage.

The research method used is empirical juridical with a qualitative approach and is descriptive in obtaining answers to this research. The data source uses primary data from interviews with informants and respondents. While secondary data from the results of literature studies relevant to the object of research.

The results showed that the former husband had tried to implement Decision Number: 122/Pdt.G/2019/PTA.JK but in its implementation it was still not maximally carried out due to insufficient economic capacity plus less harmonious communication with the former wife, causing misunderstandings that had an impact on the needs and interests of children. Efforts that can be made to overcome this problem are to establish good communication, appreciate the efforts that the former husband or former wife has carried out can submit an execution effort to the court with a record of knowing the ability of the former husband or the court can determine that the former wife shares the cost of child maintenance so that the needs and interests of her children can be fulfilled.

It is recommended that parents after the breakup of marriage maintain good communication for the benefit of their children. To the religious court to improve and supervise the implementation of the father's obligation to the cost of child maintenance after the breakup of the marriage.

Keywords: Implementation of Father's Obligation, Child Maintenance, Marriage Dissolution